IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA KOTA JAKARTA PUSAT

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Firdi Eka Putra

2056041010

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA KOTA JAKARTA PUSAT

Oleh

Muhammad Firdi Eka Putra

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA KOTA JAKARTA PUSAT

Oleh

Muhammad Firdi Eka Putra

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk mengoptimalkan proses administrasi yaitu dengan memungkinkan penyediaan layanan publik secara otomatis dan cepat. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mendalam terkait Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Kota Jakarta Pusat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan melihat tiga indikator komponen-komponen implementasi program menurut Charles O. Jones (1984) yaitu Tahap Interpretasi, Tahap Pengorganisasian dan Tahap Aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap pegorganisasian program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat memperlihatkan adanya struktur organisasi yang teratur dan jelas, dan penerapakn IKD yang mengacu pada standar pelayanan dan SOP yang telah diatur. Meski begitu terdapat beberapa permasalahan seperti keterbatasan anggaran. Pada tahap interpretasi dalam implementasi program IKD di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat terdapat sosialisasi internal dan eksternal untuk memastikan pelaksana dan masyarakat memahami tujuan dan langkah program IKD.. Pada tahap aplikasi dalam implementasi program Identitas Kependudukan Digital di Jakarta Pusat berpotensi untuk mendukung transformasi layanan digital, namun terdapat beberapa kendala seperti komunikasi, pemahaman teknologi, dan kolaborasi yang belum optimal.

Kata Kunci : Implementasi Program, Pelayanan, aplikasi, Teknologi, Digital

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL POPULATION IDENTITY (DPI) PROGRAM IN CENTRAL JAKARTA CITY

By

Muhammad Firdi Eka Putra

The Digital Population Identity (DPI) application aims to optimize the administrative process, namely by enabling the provision of public services automatically and quickly. This research is aimed at obtaining an in-depth overview regarding the Implementation of the Digital Population Identity Program (DPI) in the City of Central Jakarta. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation by looking at three indicators of program implementation components according to Charles O. Jones (1984), namely the Interpretation Stage, Organizing Stage and Application Stage. The results of this research show that At the stage of organizing the Digital Population Identity (DPI) program at the Central Jakarta City Population and Civil Registration Sub-Department, it shows that there is an orderly and clear organizational structure, and implementation DPI which refers to service standards and SOPs that have been regulated. However, there are several problems such as budget limitations. At the interpretation stage in program implementation DPI in the Central Jakarta City Population and Civil Registration Sub-Department there is internal and external outreach to ensure implementers and the public understand the objectives and steps of the DPI program. At the application stage in implementing the Digital Population Identity program in Central Jakarta, it has the potential to support digital service transformation, however there are several obstacles such as communication, understanding of technology and collaboration that are not yet optimal.

Keywords: Program Implementation, Services, Applications, Technology, Digital

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	**IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA KOTA JAKARTA PUSAT**
Nama Mahasiswa	:	Muhammad Firdi Eka Putra
Nomor Pokok Mahasiswa	:	2056041010
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.
NIP. 19880712 201903 1 012

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Meilyana, S.IP, M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.** .....

   Sekretaris : **Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si.** .....

   Penguji : **Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Mei 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 6 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,

Muhammad Firdi Eka Putra
NPM. 2056041010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2002. Yang merupakan putra dari Bapak Dadi Haryadi dan Ibu Windi Wahyuni serta anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memiliki seorang adik laki-laki bernama Muhammad Ezra Ramadhan.

Penulis memulai pendidikan formalnya pada tahun 2006 di TK Al-Amsyiriah, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Dasar di SD Kencana pada tahun 2008 dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 228 Jakarta dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 20 Jakarta dan berhasil lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri SMMPTN Barat. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam kegiatan organisasi, salah satunya dengan bergabung di Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara.

Selain itu, pada tahun 2023, penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negeri Jaya, Lampung Barat. Di tahun yang sama, juga berkesempatan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) FISIP yang dilaksanakan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung selama enam bulan.

MOTTO

"Hanya orang-orang yang berani gagal total yang bisa meraih keberhasilan total."
(Chairil Anwar)

"Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha."
(B.J. Habibie)

“Lakukan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu miliki, di tempat di mana kamu berada.”
(Theodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala rasa cinta dan terima kasih, karya ini aku persembahkan sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada

:

KELUARGAKU TERCINTA

Mama, Ayah, Ezra

Yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti. Setiap motivasi, nasihat, dan pengorbanan yang kalian berikan menjadi kekuatan terbesarku untuk mencapai tahap ini. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang dapat kubagikan sebagai kebahagiaan untuk kalian.

Serta

Almamater Tercinta

Universitas Lampung, khususnya Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat, rahmat. Dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kota Jakarta Pusat"**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada proses menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, masukan, saran, bantuan, dorongan, serta kritik dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A Selaku dosen pembimbing utama sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih yang sebesar- besarnya atas ilmu, bimbingan, serta waktu yang telah ibu berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dodi Faedlulloh, S.Sos., M.Si Selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih yang sebesar- besarnya atas ilmu, bimbingan, serta waktu yang telah bapak berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D selaku dosen penguji skripsi. Terima kasih yang sebesar- besarnya atas ilmu, bimbingan, serta waktu yang telah ibu berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Anna Gustiana Zainal, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

6. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung terima kasih atas ilmu yang diberikan selama masa studi penulis.
8. Seluruh staff Jurusan Administrasi Negara yang telah membantu penulis dalam proses administrasi studi sejak menjadi mahasiswa baru hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta, terkhusus Bapak Fendri, Ibu Mia, dan Bapak Sukma Aditya, yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data penelitian hingga penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih.
10. Untuk Keluargaku, Ayah Dadi Haryadi dan Mama Windi Wahyuni, Terima kasih atas segala perjuangan, atas cinta yang tulus, dan atas semua pengorbanan yang tak terhitung demi masa depan anak-anakmu. Ayah dan mama, kalian adalah sosok terbaik yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang tanpa batas. Setiap doa, pengorbanan, dan usaha yang kalian lakukan menjadi bekal dalam setiap langkah hidupku. Doa terbaikku selalu menyertai kalian, Ayah dan Mama tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan.
11. Kepada adikku Ezra, Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu, sukses, dan semua cita-cita yang diimpikan dapat tercapai.
12. Kepada Sepupu, Mba Dila, Kiki, Dafa, Najwa Terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat selalu, sukses, dan semua cita-cita yang diinginkan dapat tercapai.
13. Kepada Bujang Adamantia, Rizki, Rivaldo, Dika, Raihan, Jumadi, Riki, Abim, Yanuar, Rafi, Diki, Rachman, Agil, Iqbal, Arsyah, Irja terima kasih telah menjadi teman seperjuangan kebersamaan kalian tidak hanya menjadi pelengkap dalam perjalanan ini, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan,

canda, dan tempat berbagi cerita. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, dan sukses selalu untuk kalian semua.

14. Kepada Devin, Elfath, Yasin, Billy, Dies, Haikal, Erdityo, Denny, Rifky terima kasih telah menjadi teman yang luar biasa. Bersama kalian, setiap momen terasa lebih berwarna, penuh tawa, cerita, dan kebersamaan yang tak tergantikan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, dan sukses selalu untuk kalian semua.
15. Kepada teman-teman ADAMANTIA, terima kasih untuk setiap momen kebersamanan, semangat dan selalu saling membantu satu sama lain selama berorganisasi dan perkuliahan ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjalin, dan kita semua sukses meraih impian di masa depan.
16. Kepada Distrik Negara, Terima Kasih telah menemani hari hari penulis di Fisip dengan tawa, canda dan kebersamaan setiap hari di kampus. Semoga kita semua meraih kesuksesan di masa depan.
17. Kepada teman KKN Desa Negeri Jaya, Dirga, Duta, Ace, Trista, Retno,Sekar terimakasih telah menjadi teman yang baik selama sebulan penuh. Setiap momen yang kita lalui bersama, dari progja, berbagi cerita, hingga menghadapi tantangan, menjadi pengalaman berharga yang tak terlupakan. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, dan kita semua sukses dalam jalannya masing-masing.
18. Kepada Brader Kipanza, Raja, Arif, Dzarya terima kasih telah menjadi teman seperjuangan di perantauan. Kebersamaan bersama kalian tidak hanya menjadi pelengkap dalam perjalanan ini, tetapi juga sumber kebahagiaan, canda, dan tempat berbagi cerita. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga, dan sukses selalu.
19. Serta kepada semua pihak yang belum sempat penulis sebut namanya. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Setiap kontribusi, sekecil apa pun, sangat berarti dalam perjalanan ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik, dan kesuksesan untuk kita semua.
20. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri Muhammad Firdi Eka Putra. Terimakasih telah bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa

untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi, terimakasih telah menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, terimakasih juga untuk diri saya sendiri telah menjalani setiap proses dengan tekad, kesabaran dan terus belajar. Terima kasih, perjalanan masih panjang, teruslah melangkah dan berkembang.

Bandar Lampung, 9 Maret 2025
Penulis,

M. Firdi Eka Putra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7

II. TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Penelitian Terdahulu 8
2.2 Tinjauan Kebijakan Publik 11
2.3 Konsep Implementasi Program 13
2.4 Identitas Kependudukan Digital (IKD) 21
2.5 Kerangka Pikir 24

III. METODOLOGI PENELITIAN **26**
3.1 Jenis Penelitian 26
3.2 Lokasi Penelitian 26
3.3 Fokus Penelitian 27
3.4 Sumber Data Penelitian 28
3.5 Teknik Pengumpulan Data 29
3.6 Teknik Analisis Data 31
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 33

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **35**
4.1 Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta 35
4.2 Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jakarta Pusat 37
4.3 Hasil Penelitian 41
4.4 Pembahasan 97

V. PENUTUP **115**
5.1 Kesimpulan 115
5.2 Saran 116

DAFTAR PUSTAKA **117**

LAMPIRAN **120**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Jakarta Pusat Tahun 2023.....5
Tabel 2. Data Informan Wawancara 30
Tabel 3 Data Dokumentasi.....31
Tabel 4. Jumlah Penduduk DKI Jakarta.....36
Tabel 5. Jumlah Pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.....47
Tabel 6. Sarana dan Prasarana Penunjang IKD 66
Tabel 7. Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kota Jakarta Pusat 2024.....94
Tabel 8 Matriks Teori.....97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tanggapan masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital dari media *social* 6
Gambar 2 Kerangka Berpikir 25
Gambar 3 Komponen Model Analisis Data 32
Gambar 4 Peta Provinsi DKI Jakarta 35
Gambar 5 Struktur Organisasi 41
Gambar 6 Pelatihan dan Pengembangan Kompetesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 48
Gambar 7 Standar Operating *Procedure (*SOP*)* pada Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) 52
Gambar 8 Standar Pelayanan pada Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) 52
Gambar 9 Standar Pelayanan pada Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) 58
Gambar 10 Tampilan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 63
Gambar 11 Bimbingan teknis berupa Sosialisasi dan pelatihan Pegawai 71
Gambar 12 Sosialisasi IKD pada Kanor Pemerintahan, Sekolah, dan Masyarakat 74
Gambar 13 Banner Pemberitahan Program Identitas Kependudukan Digital 76
Gambar 14 Sosial Media pada Sudin Dukcapil Kota Jakarta Pusat 79
Gambar 15 Operator Melakukan Proses Aktivasi IKD kepada Masyarakat 86
Gambar 16 Kepuasan Pelayanan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat 88
Gambar 17 Layanan Mobil Keliling pada Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat 89
Gambar 18 Rating Aplikasi Kependudukan Digital 96

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era modern memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Dalam konteks global, masyarakat menghadapi tantangan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Tuntutan globalisasi menuntut pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Tantangan ini juga mempengaruhi pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai. Pelayanan publik, yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosial di negara-negara modern, melibatkan dua pihak utama: negara sebagai penyedia dan individu sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, pelayanan publik mencerminkan hubungan antara negara dan warganya. Untuk memenuhi tuntutan publik, pemerintah perlu melakukan reformasi menyeluruh dalam pelayanan publik, dengan fokus pada peningkatan mutu dan kinerja serta penyediaan layanan yang menyeluruh dan tanpa diskriminasi, guna mencapai, kepuasan semua pihak.

Salah satu program atau pelayanan publik yang dianggap baru adalah Identitas Kependudukan Digital. program ini merupakan perubahan atau inovasi dari identitas kependudukan yang awalnya berbentuk fisik yaitu E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) menjadi identitas kependudukan digital, yang umumnya terdiri dari gambar KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan kode *Quick Response* (QR), yang tidak berbentuk fisik dan bisa diakses secara elektronik.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tersebut Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Yaitu sistem yang mengintegrasikan identitas seseorang dalam bentuk digital yang mencakup informasi pribadi yang telah diverifikasi dan diakui oleh lembaga resmi, yang kemudian dapat diakses dan digunakan secara elektronik yaitu menggunakan gawai atau *handphone* untuk berbagai keperluan administratif dan layanan publik lainya.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk mengoptimalkan proses administrasi yaitu dengan memungkinkan penyediaan layanan publik secara otomatis dan cepat sehingga menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan aksesibilitas layanan publik yaitu dengan memungkinkan akses ke layanan publik dan komersial secara *online*, seperti perbankan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, meningkatkan keamanan identitas yaitu dengan melindungi data pribadi warga dengan teknologi enkripsi dan keamanan siber menggunakan teknologi biometrik seperti *Quick Response* (QR) sehingga mengurangi risiko pencurian identitas dan data, mendukung ekonomi digital yaitu dengan mempermudah dan mengamankan transaksi elektronik.

Mendukung ekonomi digital dan *e-commerce* yaitu dengan mendorong inovasi dalam teknologi digital dan layanan berbasis teknologi, membuka peluang baru dalam bisnis dan pemerintahan, memperbaiki pengelolaan data kependudukan yaitu dengan mempermudah pemantauan dan evaluasi program-program pemerintah melalui data yang terintegrasi dan *real-time*, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas yaitu dengan mengurangi peluang korupsi dengan adanya sistem verifikasi yang transparan dan terintegrasi. Dengan demikian, IKD tidak hanya membantu dalam mengelola

data kependudukan dengan lebih efisien tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan aman.

Program IKD, merupakan inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri, yang mulai diperkenalkan dan diimplementasikan pada bulan Juni 2022. Program ini dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Suku Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan juga kecamatan yang bertujuan untuk memungkinkan seluruh warga Indonesia mengelola dan mengakses informasi identitas mereka secara digital melalui aplikasi tersebut.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dapat diakses secara *online* melalui perangkat seluler yang dimiliki setiap penduduk, dengan cara mengunduhnya dari *PlayStore* untuk pengguna android atau dari *appstore* untuk pengguna iOS. Aplikasi ini dapat digunakan di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah menerapkan sistem identitas kependudukan digital. Proses pendaftaran dan verifikasi identitas melalui aplikasi IKD dimulai dengan mengunduh aplikasi tersebut ke perangkat seluler, kemudian pengguna perlu mengisi informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor telepon.

Setelah itu, penduduk melakukan verifikasi wajah melalui swafoto dan memindai *QR (Quick Respone) Code* dengan bantuan petugas disdukcapil, baik secara langsung atau melalui *videocall* ke nomor *WhatsApp* pegawai disdukcapil pada jam kerja. Alternatif lainnya adalah melalui kecamatan sesuai dengan domisili penduduk. Jika pendaftaran berhasil, penduduk akan menerima email berisi kode aktivasi. Kode tersebut kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke beranda aplikasi yang menampilkan berbagai fitur menu, seperti Data keluarga, Histori Aktivitas, Dokumen, Ubah PIN/Kata Kunci Tanda Tangan Elektronik, Hapus Akun, Pelayanan, Keterangan, Pemantauan Pelayanan, serta opsi untuk KTP Digital, Biodata, Pindai, dan Kunci.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini berfokus pada penggunaan dokumen KTP Digital dan menyediakan berbagai layanan terkait

administrasi kependudukan secara digital. Dalam pendaftaran kependudukan, layanan yang tersedia meliputi pelayanan cetak biodata WNI (Warga Negara Indonesia), perubahan golongan darah, pisah atau pecah kartu keluarga, pelayanan pindah individu. Sementara itu, dalam pencatatan sipil, layanan yang disediakan mencakup permohonan untuk pendaftaran kelahiran WNI (baik untuk anak yang belum memiliki NIK maupun yang sudah memiliki NIK), serta pembuatan dokumen kematian.

Adanya aplikasi IKD ini diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, menjadikan proses administrasi kependudukan lebih efisien, aman, dan mudah diakses. Namun dengan jumlah penduduk yang besar di Kota Jakarta, berbagai masalah terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terjadi setiap hari. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pembaruan data administrasi kependudukan mereka masih rendah. Administrasi kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki peran yang sangat penting dalam semua layanan yang diberikan kepada masyarakat, mulai dari kelahiran hingga kematian. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari pentingnya mengurus data administrasi kependudukan mereka. Tindakan ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan data administrasi kependudukan terbaru dengan lebih efisien dan lancar.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat adalah salah satu perangkat daerah kota yang bertanggung jawab atas implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Program ini dijalankan pada tahun 2022 yang di targetkan untuk masyarakat yang sudah memiliki E-KTP dan wajib KTP. Berikut data jumlah aktivasi layanan IKD di Kota Jakarta Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Jakarta Pusat Tahun 2023

Progres Rekam KTP	Target IKD 25%	Jumlah Aktivasi	Presentasi IKD
836,835	208.533	66.585	16,64

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, sebanyak 836.835 jiwa telah melakukan perekaman KTP. Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta menetapkan target cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 25% pada tahun 2023, yaitu sebanyak 208.533 jiwa. Namun, data menunjukkan bahwa baru 66.585 jiwa yang telah melakukan aktivasi IKD, yang hanya mencapai 16,64%. Ini menunjukkan bahwa Kota Jakarta Pusat belum mencapai target 25% yang diharapkan.

Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat di sekitar, ditemukan bahwa masih banyak yang belum memahami cara mengaktifkan aplikasi IKD dan manfaatnya, hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang disampaikan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat pada Kota Jakarta Pusat (Wawancara dengan Bapak Reza Ramadhan, warga Kecamatan Kemayoran, 25 November 2023).

Wawancara juga dilakukan dengan pegawai operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan IKD di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, yang mengungkapkan bahwa mereka sering menghadapi kesulitan dalam memberikan pelayanan ketika Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat atau aplikasi IKD mengalami *error* atau gangguan.

Gambar 1. Tanggapan masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital dari media *social*

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan data informasi yang diperoleh dari media sosial Twitter mengenai tanggapan Program Identitas Kependudukan Digital, akun @RosidSinamor berpendapat bahwa program ini secara digital memang lebih baik dan praktis, namun sosialisasinya perlu ditingkatkan kepada masyarakat lapisan bawah karena masih banyak yang belum memahaminya. Sementara itu, akun @Niko_anzas menyarankan agar sosialisasi juga dilakukan ke bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan swasta terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar program ini dapat diterapkan di sana. Dari beberapa fakta yang ditemukan oleh peneliti, Oleh karena itu, diperlukan implementasi program yang baik untuk sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Implementasi yang efektif akan memastikan bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, dan mendukung pencapaian standar pelayanan publik yang tinggi.

Dengan demikian, program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih efisien dan terpercaya. Berdasarkan permasalahan yang sudah diurai peneliti, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "**Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Pada Kota Jakarta Pusat** ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahannya, yaitu bagaimana implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Kota Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka peneliti dapat merumuskan tujuan dalam penelitian yaitu: untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Kota Jakarta Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan keuntungan baik dari segi praktis maupun teoritis bagi semua pihak yang terlibat.

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menyumbangkan pengetahuan terhadap kemajuan Ilmu Administrasi Negara secara khusus, serta bermanfaat bagi masyarakat umum yang berkaitan tentang implementasi program.

2. Manfaat Praktis
   a) Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang baik untuk meningkatkan implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.
   b) Bagi peneliti, untuk mengembangkan kemampuan dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung.
   c) Bagi Pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi maupun sebagai referensi tentang implementasi pada program Identitas Kependudukan Digital (IKD).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi literatur adalah upaya membandingkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kemiripan dan perbedaan antara hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari penelitian yang dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2024) mengenai Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan metode analisis George C. Edward III. Penelitian ini mengungkapkan empat faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi yang belum berjalan optimal. Pertama, pada aspek komunikasi, terdapat kendala pada proses transmisi informasi yang tidak berjalan lancar, kejelasan informasi yang kurang memadai, dan inkonsistensi dalam penyampaian. Kedua, dalam hal sumber daya, meskipun kinerja staf dinilai efektif, penataan ruang masih kurang terorganisasi dengan baik. Ketiga, terkait sikap pelaksana, proses pemeringkatan berjalan lancar, tetapi pemberian insentif masih belum mencukupi. Keempat, dari segi struktur birokrasi, penerapan standar operasional prosedur (SOP) sudah berjalan dengan baik, dan pembagian tugas atau fragmentasi cukup terstruktur. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat dan kendala konektivitas internet menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Namun, keberadaan mentor dianggap sebagai faktor pendukung yang mempermudah implementasi program tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Prathama (2023) dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak berfokus pada partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendorong tertib administrasi kependudukan di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Tujuan penelitian ini adalah memahami tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh manfaat yang dirasakan, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan fleksibilitas dalam melakukan registrasi tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan. Namun, terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi, seperti kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD) dan preferensi sebagian masyarakat untuk tetap menggunakan layanan tatap muka karena dianggap lebih mudah. Kesimpulannya, inovasi pelayanan melalui aplikasi Identifikasi Kependudukan Digital (IKD) di Kota Surabaya telah memberikan kemudahan, terutama bagi generasi milenial. Namun, optimalisasi aplikasi ini memerlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta memastikan aksesibilitas yang lebih baik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Penelitian yang dilakukan oleh Anryana dkk (2024) dengan judul Penerapan *E- Government* melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat membahas penerapan *e-government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelayanan kependudukan berbasis *e- government* di instansi tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* melalui aplikasi Identitas

Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sumbawa Barat berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis teori Indrajit, terdapat tiga elemen utama yang mendukung implementasi ini: dukungan (*support*) , kapasitas (*capacity*), nilai (*value*) Secara keseluruhan, implementasi *e-government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sumbawa Barat memberikan dampak positif terhadap pelayanan kependudukan, mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap dokumen kependudukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Permadi & Rokhman (2023) berfokus pada implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya pengamanan data pribadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan menganalisis sejauh mana penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat melindungi data pribadi masyarakat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh dari implementasi tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara terstruktur, dan dokumentasi dari sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) berbasis aplikasi Android telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Identitas Kependudukan Digital (IKD) berfungsi sebagai representasi digital dari identitas penduduk, memfasilitasi verifikasi data secara elektronik, dan meningkatkan keamanan data pribadi melalui sistem autentikasi yang canggih. Namun, terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, dan kebutuhan sosialisasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih memadai, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan data pribadi.

Berdasarkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat memiliki persamaan dalam menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan utama terletak pada teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teori implementasi program menurut Jones dan dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di wilayah perkotaan dan tantangan yang dihadapi dalam prosesnya.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik

2.2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* adalah instrumen yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tertentu dan menyelesaikan masalah publik. Pemerintah perlu membuat kebijakan publik untuk mencapai tujuan ini. Kebijakan merupakan instrumen pemerintahan, yang mencakup dua aspek utama: governance, yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik, dan government, yang hanya mencakup aparatur negara. Secara fundamental, kebijakan adalah tindakan yang diambil untuk mengatur distribusi dan pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan manusia demi melayani kepentingan umum, yaitu masyarakat secara keseluruhan, warga negara, dan penduduk. Kebijakan publik muncul sebagai respons terhadap isu-isu dan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat (Kawengian, 2018).

Kebijakan publik adalah hasil dari tindakan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, yang menetapkan kebijakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Desrinelti et al., 2021). Menurut Anderson, yang dikutip oleh Agustino (2017),

kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau sekelompok individu yang berhubungan dengan masalah tertentu atau hal yang menjadi perhatian.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat di definisikan serangkaian keputusan, prinsip, dan tindakan yang dirancang dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menangani isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang penting bagi masyarakat. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses perumusan dan penetapan arahan strategis yang diambil oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan kendala yang ada.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

   Penyusunan agenda adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik. Pada tahap ini, ada kesempatan untuk memahami isu-isu publik dan menentukan prioritas agenda yang akan dijalankan. Penyusunan agenda ini sangat penting untuk memutuskan apakah suatu masalah publik dapat diangkat ke dalam agenda pemerintah.

2. Formulasi Kebijakan

   Setelah tahap penyusunan agenda selesai, langkah berikutnya adalah membahas isu-isu yang telah dimasukkan ke dalam agenda kebijakan dengan para pembuat kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, tersedia berbagai alternatif kebijakan, dan setiap alternatif akan dipilih sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

3. Adopsi dan Legitimasi Kebijakan

   Tahap legitimasi kebijakan bertujuan untuk memberikan otorisasi pada proses fundamental pemerintahan. Dengan legitimasi kebijakan, alternatif kebijakan yang telah dirumuskan didasarkan pada dukungan mayoritas legislatif, kesepakatan antara lembaga, atau keputusan pengadilan, sehingga kebijakan tersebut sah untuk diimplementasikan.

4. Implementasi Kebijakan

   Implementasi kebijakan adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui kemudian dijalankan oleh berbagai unit administrasi pemerintah.

5. Evaluasi Kebijakan

   Evaluasi kebijakan adalah tahap penilaian yang mencakup aspek substansi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga diterapkan sepanjang seluruh proses kebijakan.

2.3 Konsep Implementasi Program

2.3.1 Program

Kebijakan publik dan program adalah dua komponen yang saling melengkapi dalam manajemen publik dan pemerintahan. Kebijakan memberikan kerangka kerja dan tujuan umum, sementara program adalah cara untuk mewujudkan kebijakan tersebut menjadi tindakan nyata. Program didasarkan pada kebijakan publik. Menurut Joan L. Herman sebagaimana yang dikutip oleh Tayibnapis (2000) Program ialah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Selanjutnya program juga adalah elemen fundamental yang diperlukan untuk memulai suatu kegiatan. Dalam sebuah program, berbagai aspek dirancang dan dijelaskan, termasuk rincian tentang:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Menurut Jones (1996), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Secara keseluruhan yang sudah dijelaskan diatas, program adalah alat yang krusial untuk menerjemahkan kebijakan publik menjadi tindakan yang dapat diukur dan dievaluasi, sehingga memungkinkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.2 Implementasi Program

Program adalah elemen mendasar yang harus ada untuk mencapai keberhasilan implementasi. Elemen kedua yang penting dalam proses implementasi program adalah partisipasi kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran, memastikan bahwa masyarakat terlibat dan merasakan dampak positif dari program yang dilaksanakan, sehingga terjadi perubahan dan peningkatan dalam kehidupan mereka. Tanpa manfaat nyata bagi masyarakat, program tersebut dianggap gagal. Keberhasilan suatu program dalam implementasinya sangat bergantung pada peran para pelaksananya yaitu eksekutif Ariska Tri

Viky Andani (2019).

Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah tahap yang berlangsung setelah undang-undang ditetapkan, di mana otoritas program, kebijakan, atau hasil nyata mulai diwujudkan. Proses implementasi mencakup berbagai tindakan oleh beberapa aktor, terutama para birokrat, yang bertugas untuk memastikan bahwa program dapat berjalan sesuai dengan rencana (Satria, 2024).

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, seperti yang dijelaskan oleh Wahab (2005), implementasi berfokus pada pemahaman tentang apa yang terjadi setelah suatu program diterapkan atau dirumuskan. Ini mencakup kejadian dan kegiatan yang muncul setelah disahkannya pedoman kebijakan negara, termasuk usaha-usaha untuk mengelola serta menciptakan dampak atau efek nyata pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi sendiri terdiri dari beberapa tahapan, seperti: pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan Implementasi program merupakan proses yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai tindakan dan aktor yang bertujuan untuk mewujudkan otoritas, kebijakan, atau hasil nyata yang diharapkan dari program tersebut.

2.3.3 Model-Model Implementasi Program

A. Model implementasi yang dikembangkan Hogwood dan Gunn (2004)

Model ini dikenal sebagai *top down approach* yang artinya dari tingkatan paling atas ke tingkat paling bawah, untuk mencapai implementasi kebijakan yang sempurna, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan tertentu antara lain: (1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menyebabkan hambatan atau kendala yang signifikan (2) Waktu dan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program cukup memadai (3) Semua sumber daya yang diperlukan tersedia secara lengkap (4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan pada hubungan kausal yang kuat dan terpercaya (5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dengan hanya sedikit mata rantai penghubung di antaranya. (6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil (7) Tugas-tugas diuraikan secara rinci dan disusun dalam urutan yang tepat (8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan (9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang dapat menuntut dan memastikan kepatuhan secara penuh (Djuyandi, 2013).

Model implementasi kebijakan menurut Hogwood dan Gunn ini menerapkan pendekatan *top-down*, di mana proses dimulai dari arahan atau instruksi dari tingkat atas yang kemudian dilanjutkan kepada tingkat bawah. Model ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami dan meningkatkan implementasi kebijakan. Model ini menyoroti tentang pentingnya perencanaan yang matang, sumber daya yang cukup, dan struktur yang jelas dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

B. Model Van Meter dan Van Horn

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van

Horn dalam Subarsono (2005) menekankan bahwa “implementasi kebijakan mengikuti jalur linear yang mencakup kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik” beberapa variabel yang dimasukkan dalam model ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi dan relevan dalam proses kebijakan publik yaitu:

a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
b) Karakteristik dan agen pelaksana atau implementor.
c) Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
d) Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan bertujuan untuk mencapai kinerja yang optimal dan terjadi melalui interaksi berbagai faktor. Sebuah kebijakan menetapkan standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Jadi, pada model Van Meter dan Van Horn ini menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang linear, dimulai dari formulasi kebijakan, melalui tahap implementasi oleh pelaksana, hingga evaluasi kinerja kebijakan. Proses ini dipandang sebagai rangkaian yang berkesinambungan, di mana setiap tahap saling memengaruhi dan menentukan keberhasilan tahap berikutnya.

Menurut Rippley dan Franklin dalam Subarsono (2005) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu: (Aneta, 2010).

a) Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana.
b) Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan.
c) Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

Ripley dan Franklin menekankan bahwa implementasi adalah

apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan, di mana otoritas program, manfaat kebijakan, atau jenis keluaran lainnya dihasilkan. Proses implementasi ini mencakup berbagai tindakan oleh sejumlah aktor, terutama para birokrat, yang berupaya memastikan bahwa program dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

C. Charles O. Jones (1996)

Charles O. Jones juga mendefinisikan implementasi program sebagai "*implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*" yang berarti bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang ditujukan untuk menjalankan sebuah program guna menghasilkan efek atau dampak tertentu. Jones (1996) menyatakan bahwa program adalah salah satu komponen dari suatu kebijakan dan merupakan upaya resmi yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi program terdiri dari tiga pilar utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*. Jones (1996) bependapat, tiga pilar utama dalam melaksanakan program meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan.

1) Pengorganisasian (*organization*)

Penting untuk memahami bahwa organisasi mempengaruhi proses kebijakan secara signifikan. Tujuan utama organisasi adalah untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang. Organisasi melibatkan pembentukan struktur, pengalokasian sumber daya, dan penggunaan metode untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, pedoman, standar, serta tujuan yang ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, organisasi berhubungan erat dengan birokrasi. Birokrasi diperlukan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Organisasi bertujuan untuk menjelaskan dan menjalankan program-

program yang telah direncanakan. Jones mengartikan kegiatan organisasi dalam implementasi kebijakan sebagai proses yang melibatkan penentuan unit kerja, pembagian tugas antar unit organisasi, serta alokasi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Beberapa aspek dalam pilar organisasi yaitu:

a. Unit-unit atau struktur organisasi merujuk pada sistem formal yang mencakup aturan, tugas, dan hubungan otoritas. Struktur ini mengatur bagaimana anggota organisasi bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Keberadaan struktur organisasi dapat mempermudah proses implementasi karena memungkinkan identifikasi pihak-pihak yang terlibat serta posisi mereka dalam organisasi.

b. Sumber daya adalah aspek krusial dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan, karena keberadaannya dapat mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Agar kebijakan atau program dapat berjalan dengan efektif, penting untuk memperhatikan kesiapan dan ketersediaan sumber daya pelaksana. Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah program meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya finansial.

c. Metode mengacu pada rangkaian proses yang dilakukan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya dan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan manajemen, dengan mempertimbangkan dinamika dan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan. Dalam konteks kegiatan organisasi, metode merujuk pada cara organisasi menjalankan kebijakan kepada masyarakat agar sesuai dengan pedoman, rencana, standar, dan tujuan yang diinginkan.

2) Interpretasi (*interpretation*)

Interpretasi penting untuk menafsirkan program agar menjadi rencana dan arahan yang jelas, dapat diterima, dan dapat dilaksanakan. Proses kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif antar pihak yang terlibat serta sejauh mana pemahaman yang diperoleh. Program harus disusun dengan jelas, tepat, dan akurat sesuai ketentuan yang ada. Tujuannya adalah agar pelaksana program memahami dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam mengimplementasikan program, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

3) Penerapan (*application*)

Penyesuaian dalam organisasi dan penafsiran selama penerapan program biasanya merupakan hal yang umum. Penafsiran politik dari pihak berwenang mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara praktis di lapangan, dan sebaliknya, penerapan sering kali merupakan proses dinamis di mana pelaksana atau petugas dipandu oleh pedoman program, patokan, atau kondisi aktual yang ada. Analisis ini menunjukkan bahwa proses penerapan adalah aktif dan selalu berubah, yang perlu ditekankan dalam buku ini. Hal ini tidak hanya menunjukkan kemungkinan kecil untuk penerapan literal suatu peraturan, tetapi juga bahwa pihak-pihak yang berusaha menerapkan peraturan tersebut akan menghadapi masalah dalam organisasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk membuat prosedur kerja yang jelas agar program dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak berbenturan dengan program lainnya.

Kesimpulan dari pernyataan Jones (1996) adalah bahwa dalam implementasi program, terdapat tiga pilar utama yang harus diperhatikan:

1. Pengorganisasian, Struktur organisasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Struktur ini melibatkan aturan, pembagian tugas, dan hubungan otoritas yang memastikan anggota organisasi bekerja sama dengan efisien dan memanfaatkan sumber daya termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sumber daya finansial secara efektif untuk mencapai tujuan kebijakan.
2. Interpretasi, Interpretasi melibatkan pemahaman tentang maksud dan tujuan kebijakan yang telah dirancang seperti fleksibilitas dalam penerapan, komunikasi dan Umpan Balik
3. Penerapan, Penerapan adalah fase kritis di mana kebijakan yang telah dirancang diwujudkan dalam tindakan nyata. Penerapan mencakup eksekusi praktis dari kebijakan, di mana langkah-langkah konkret diambil untuk menerjemahkan rencana kebijakan menjadi hasil yang dapat diukur.

Ketiga pilar ini harus dilaksanakan dengan baik untuk memastikan bahwa program dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan menggunakan model implementasi program dari Jones (1996), yang mencakup tiga pilar utama aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu pengorganisasian (*organization***)**, interpretasi (*interpretation***)**, dan penerapan (*application***)**.

2.4 Identitas Kependudukan Digital (IKD)

2.4.1 Pengertian Adminsitrasi Kependudukan

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang melibatkan pengaturan dan pengaturan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, manajemen informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk

keperluan pelayanan publik dan pembangunan di sektor lainnya. Sementara itu, konsep administrasi menurut Siagian (1990) adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berperan sebagai lembaga yang bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat dalam proses pembuatan identitas individu atau kelompok.

Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting yang dilaksanakan mulai dari tingkat pemerintahan terkecil seperti desa hingga pada skala nasional. Pengelolaan administrasi kependudukan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi pembuatan sebuah kebijakan dalam rangka pelayanan publik dan kepentingan masyarakat untuk mencari informasi hasil administrasi tersebut. Tujuan dari adanya administrasi kependudukan yaitu:

1) Tertib dalam *database* kependudukan.
2) Tertib dalam penerbitan Nomer Induk Keluarga (NIK).
3) Terbitnya dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta dll.

2.4.2 Pengertian Identitas Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas kependudukan digital adalah data elektronik yang dipergunakan untuk mewakili dokumen kependudukan dan informasi yang tersimpan dalam aplikasi digital, dapat diakses melalui ponsel yang menampilkan detail pribadi sebagai identitas individu yang bersangkutan. Beberapa persyaratan untuk memperoleh identitas kependudukan digital adalah memiliki ponsel

pintar, telah memiliki kartu tanda penduduk elektronik fisik atau belum, pernah memiliki kartu tanda penduduk elektronik fisik tetapi sudah melakukan perekaman. Identitas kependudukan digital bisa diakses melalui aplikasi *mobile* maupun *web* menggunakan jaringan publik.

2.4.3 Perbedaan Identitas Kependudukan Digital dengan Kartu Tanda Penduduk Digital

Bedanya identitas kependudukan digital dengan kartu tanda penduduk elektronik yang berbentuk fisik yaitu:

a. Kartu tanda penduduk elektronik berbentuk kartu yang bisa dipegang sementara identitas kependudukan digital berupa gambar kartu tanda penduduk dan QR (*Quick Respon) Code.*
b. Kartu tanda penduduk elektronik perlu dicetak oleh dinas penduduk dan catatan sipil setelah penduduk melakukan pengajuan dan perekaman identitas dirinya sementara identitas kependudukan digital tidak memerlukannya karena terdapat di masing-masing ponsel penduduk.
c. Kartu tanda penduduk elektronik biasa disimpan di dalam dompet atau penyimpan kartu sementara identitas kependudukan digital tersimpan di dalam ponsel.
d. Kartu tanda penduduk elektronik bisa langsung kita ambil dan lihat datanya secara langsung tanpa membutuhkan koneksi internet sedangkan identitas kependudukan digital membutuhkan koneksi internet untuk bisa mengakses di dalam ponsel kita.
e. Penduduk perlu mencetak dan membawa dokumen fisik kartu keluarga dan dokumen-dokumen lainnya sementara pada identitas kependudukan digital terdapat dokumen kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan dokumen lainnya dalam satu genggaman. Selain itu pengajuan pelayanan administrasi kependudukan bisa dilakukan dengan mudah melalui satu aplikasi.
f. Kartu tanda penduduk elektronik yang masih berbentuk fisik bisa

dengan mudah digunakan disebarluaskan dan disalahgunakan oleh pihak lain sedangkan aplikasi identitas kependudukan digital dilengkapi dengan fitur *Personal Identification Number* (PIN) lepas perangkat pemblokiran, pencegahan tangkapan layar kode QR (*Quick Respone) code* yang selalu berubah-ubah sehingga lebih aman.

2.4.4 Tata Cara Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Cara penerbitan identitas kependudukan digital (IKD) yaitu:

a. Penduduk mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui telepon seluler.
b. Penduduk melakukan registrasi dengan memasukkan Nomor Induk Keluarga (NIK) Email nomor HP.
c. Melakukan swafoto di depan petugas untuk verifikasi wajah dan pindai kode QR (*Quick Respone*).
d. Jika pendaftaran berhasil maka penduduk akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi penduduk wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui email penduduk.
e. Setelah melakukan login menggunakan kata sandi yang telah diberikan sebelumnya, terdapat dua cara untuk menampilkan e-KTP, yaitu dengan menampilkannya di layar atau dalam bentuk kode QR (*Quick Respone*). Setelah berhasil login, akan muncul beranda aplikasi yang berisi menu utama.

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan. Kerangka pemikiran ini memberikan dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan memastikan fokus tetap pada permasalahan utama dan mencegah penyimpangan dari pokok persoalan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2019).

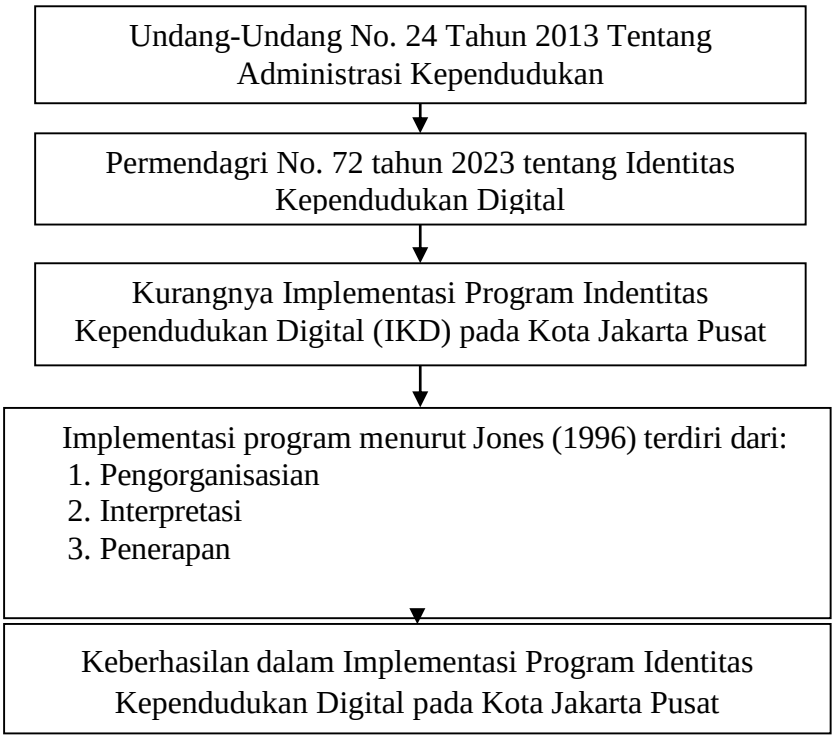

Gambar 2. Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data yang tidak berbentuk angka, melainkan berupa wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode, yang fokusnya adalah memahami dan memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode kualitatif merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami lebih dalam makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terkait dengan masalah kemanusiaan atau sosial, sesuai dengan pendapat Creswell (2015).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena ingin menggambarkan realitas empirik dibalik intrumen secara mendalam, rinci dan tuntas. Peneliti bermaksud ingin mengumpulkan data, dan implementasi program Identitas Kependudukan Digital implementasi program identitas kependudukan digital di Kota Jakarta Pusat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi peneltian dilaksanakan di Kota Jakarta Pusat pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat karena berdasarkan pengamatan di lapangan dan data dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Karena Kota Jakarta Pusat merupakan salah satu wilayah yang penduduknya masih banyak yang belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari data yang didapat dan wawancara dengan masyarakat ditemukan masalah kurangnya informasi dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Jakarta Pusat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penentuan batasan topik yang akan diselidiki, yang bertujuan untuk memperoleh data yang akan dikumpulkan, dianalisis, diolah, dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang telah ditetapkan. Penetapan fokus penelitian merupakan langkah penting dalam suatu penelitian karena membantu mencegah penyebaran yang tidak terkendali dalam mempersiapkan dan mengatasi masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini pembatasan penelitian didasari pada urgensi, kepentingan dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan (Sugiyono, 2017). Penelitian Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Jakarta Pusat ini menggunakan teori Jones (1996) yang melihat proses implementasi yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. Berikut merupakan uraian fokus penelitian ini.

1. Pengorganisasian, yaitu organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan program Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Jakarta Pusat pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat yang mencakup tentang:
   a) Sumber daya yang mendukung dalam implementasi program identitas kependudukan digital. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya sarana dan prasarana. Sumber daya manusia meliputi aktor atau fasilitator yang terlibat dalam program identitas kependudukan digital. Sumber daya finansial meliputi anggaran dan sarana-prasarana yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Pusat dalam pelaksanaan program identitas kependudukan digital.

b) Struktur organisasi dalam tim pelaksana program identitas kependudukan digital di Kota Jakarta Pusat pada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Untuk melihat apakah dalam Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat telah melakukan pembagian tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program.

2. Interpretasi

   Interpretasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat mengenai pemahaman tentang program Identitas kependudukan Digital (IKD) serta rencana pengarahan yang tepat. Hal tersebut guna melihat bentuk komunikasi antar sasaran dan antar anggota pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat sebelum melakukan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, serta Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan. Metode dalam penyampaian informasi kegiatan dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat kepada masyarakat di Kota Jakarta Pusat dan inovasi kegiatan yang dilakukan.

3. Penerapan

   Penerapan kegiatan program identitas kependuduan digital berdasarkan Sikap para pelaksana dalam menjalankan program dan kesuaian program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data merujuk pada segala hal yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data

yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data dengan teknik wawancara langsung (Sugiyono,2019). Data primer bisa berupa pengamatan, wawancara, catatan di lapangan dan penggunaan dokumen. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan teknik metode dalam pemilihan sampel sumber data dengan menetapkan informan. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan deskripsi terkait Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Jakarta Pusat.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber referensi seperti jurnal, buku, atau artikel yang diambil dari berbagai sumber, termasuk internet. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dan penting dalam penelitian ini. Data sekunder adalah informasi yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti, tetapi melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019). Peneliti mendapatkan data sekunder melalui informan dan responden. Informan adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang sedang diteliti, sedangkan responden adalah individu yang diminta memberikan informasi melalui wawancara. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari karyawan Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi antara dua pihak yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan yang terkait dengan penelitian. Dalam wawancara, pewawancara dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada informan mengenai objek penelitian

dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Menurut Arikunto (2016), wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara di mana pewawancara mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih mengikuti pedoman wawancara yang telah ditentukan sebelumnya.

Pertanyaan dapat berkembang seiring berlangsungnya wawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yang lebih bebas, di mana hanya beberapa poin pokok yang diajukan sehingga memungkinkan informasi untuk berkembang lebih luas.

Tabel 2. Data Informan Wawancara

NO	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Fendri Sinurat, S.H., M.Si.	Kepala bagian bidang pendaftaran penduduk pada Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta	Pelaksana program IKD dan penyampaian informasi serta tujuan adanya program IKD
2.	Mia Mahayati	Kasi bagian pendaftaran penduduk pada Suku Dinas Disdukcapil Kota Jakarta Pusat	Sebagai pelaksana program IKD dan penyampaian informasi serta tujuan adanya program IKD
3.	Sukma Aditya	Operator	Sebagai pelaksana program IKD
4.	Masyarakat	Masyarakat	Meminta penilaian terkait program IKD

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

3.5.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi merujuk pada penggunaan berbagai sumber data seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar sebagai pelengkap dari metode observasi atau wawancara, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Dokumentasi membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang dapat mendukung penelitian, seperti laporan dan keterangan, sehingga mempermudah proses penelitian di lapangan.

Tabel 3 Data Dokumentasi

No.	Dokumentasi
1.	Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 71 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Indentitas Kependudukan Digital.

Sumber : Data diolah peneliti, 2025

3.5.3 Observasi

Menurut Sugiyono (2018), teknik observasi digunakan untuk mengamati perilaku *nonverbal*. Observasi adalah metode pengumpulan data yang lebih khusus dibandingkan dengan teknik lainnya. Dalam kegiatan observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna di balik perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung di lapangan, memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dan menganalisis kondisi sebenarnya dari Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Jakarta Pusat.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2008), analisis data adalah proses sistematis dalam menemukan dan mengatur data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya agar lebih mudah dipahami, serta dapat disampaikan kepada orang lain dengan jelas. Komponen model dalam analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu:

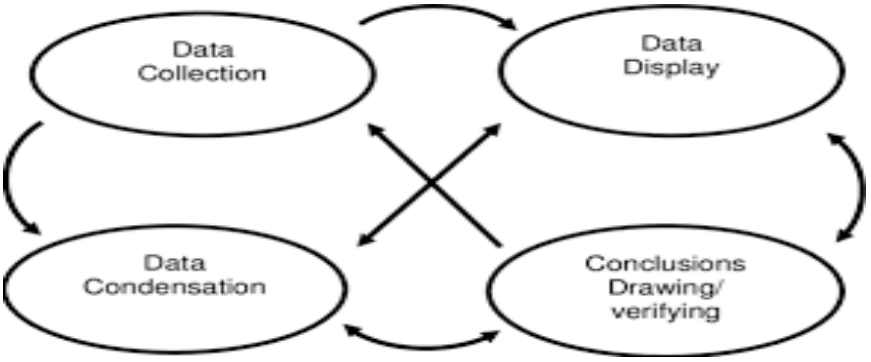

Gambar 3. Komponen Model Analisis Data
Sumber : *Milles dan Huberman dalam* (Saldana, 2014)

3.6.1 **Kondensasi data (*Data Condensation*)**

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penekanan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris. Proses kondensasi data ini terjadi setelah peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data tertulis di lapangan. Selanjutnya, hasil wawancara dipilih untuk difokuskan sesuai dengan kebutuhan penelitian oleh peneliti. Proses ini sangat memudahkan peneliti karena peneliti dapat memilih poin-poin pentingnya sehingga memudahkan dalam memahami hasil dari Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kota Jakarta Pusat.

3.6.2 **Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data adalah proses pengaturan, penggabungan, dan pengumpulan informasi yang diperoleh. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman konteks penelitian serta analisis yang lebih mendalam, sehingga memfasilitasi pengambilan tindakan yang sesuai.

3.6.3 **Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)**

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir yang mengandung inti dari hasil temuanpenelitian, yang menyajikan pendapat-pendapat yang telah dianalisis sebelumnya. Kesimpulan harus sesuai dengan fokus serta tujuan penelitian, serta berdasarkan interpretasi dan pembahasan temuan penelitian yang telah dilakukan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Zuldafrial (2012), konsep keabsahan data mencakup validitas data dan keandalan data, yang memiliki versi yang disesuaikan dengan penelitian kuantitatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip, kriteria, dan paradigma penelitian yang digunakan. Lincoln dan Guba, seperti yang dikutip dalam Wijaya (2018), menyatakan bahwa keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah konsep yang dinamis dan kompleks, yang tidak memiliki konsistensi dan kesamaan seperti sebelumnya. Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif memiliki keabsahan yang memadai sebagai dasar ilmiah, dilakukan uji keabsahan data. Beberapa uji keabsahan data yang dapat dilakukan meliputi.

3.7.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Pengujian kredibilitas atau kepercayaan merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan sebagai karya ilmiah. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa untuk menguji kepercayaan data dalam penelitian kualitatif, metode yang dapat digunakan antara lain adalah observasi terhadap kekurangan, meningkatkan ketahanan penelitian, menerapkan triangulasi, berdiskusi dengan rekan, menganalisis kasus negatif, dan melakukan inspeksi oleh anggota tim penelitian.

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2013). Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

3.7.2 Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas dalam penelitian kualitatif merujuk pada validitas eksternal. Validitas eksternal mencerminkan ketepatan dan relevansi

hasil penelitian untuk populasi yang menjadi sumber sampel. Konsep transferabilitas terkait dengan kemungkinan menerapkan atau memanfaatkan hasil penelitian dalam konteks atau situasi yang berbeda (Sugiyono, 2019).

3.7.3 Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dalam konteks penelitian kualitatif, istilah yang merujuk pada konsep ini adalah keandalan. Keandalan penelitian mencerminkan kemampuan untuk direproduksi atau diulang oleh orang lain. Dalam penelitian kualitatif, pengujian keandalan dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses penelitian. Peneliti biasanya tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data lapangan, tetapi menyediakan data yang telah dikumpulkan secara umum. Penelitian semacam ini memerlukan pengujian menggunakan metode ini untuk menilai tingkat keandalannya.

3.7.4 Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Pengujian kualitatif yang mengukur obyektivitas juga dikenal sebagai konfirmabilitas. Jika hasil penelitian disetujui oleh sejumlah besar individu, maka penelitian tersebut dianggap objektif. Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif merujuk pada penilaian hasil penelitian terkait dengan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan hasil dari proses penelitian yang dilakukan, ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan implementasi Program Identitas Kependudukan di Kota Jakarta Pusat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat masih belum berjalan secara optimal. Dari target capaian sebesar 25%, realisasi program hingga saat ini baru mencapai 18,25%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang perlu menjadi perhatian serius. Sosialisasi yang dilakukan secara terstruktur kepada para pelaksana dan masyarakat memang telah membantu dalam memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai tujuan, manfaat, serta prosedur pelaksanaan program. Namun, kurangnya rasa urgensi pada program tersebut di kalangan masyarakat menyebabkan tingkat penerimaan terhadap program IKD masih rendah. Banyak warga yang belum merasa perlu untuk segera beralih ke identitas digital, karena belum merasakan langsung manfaat praktis dari penggunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari.

Padahal, program IKD memiliki potensi besar dalam mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan ke arah yang lebih modern, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Program ini dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbasis data dan identitas digital, sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital nasional. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kendala komunikasi antara instansi pelaksana dan masyarakat, kesenjangan literasi teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor yang belum berjalan optimal.

5.2 Saran

a. Program IKD perlu disosialisasikan lagi secara masif melalui berbagai media, baik *online* maupun *offline*. Untuk menjangkau masyarakat yang kurang paham teknologi, perlu adanya pendampingan atau penyediaan layanan bantuan di pusat-pusat pelayanan, seperti kantor kecamatan, kelurahan, atau melalui *hotline* khusus. Agar IKD lebih relevan dan diminati, pemerintah dapat mendorong integrasi IKD dengan berbagai layanan publik dan swasta. Misalnya, menjadikan IKD sebagai syarat utama untuk layanan kesehatan, perbankan, transportasi, atau bahkan dalam transaksi bisnis. Ini akan memberikan nilai tambah dan mendorong masyarakat serta instansi untuk lebih aktif menggunakannya dan juga perlu dilakukan koordinasi yang lebih erat dan penyusunan kerjasama yang berkelanjutan antar instansi pemerintah

b. Saran lainnya untuk penelitian selajutnya adalah untuk meneliti sejauh mana regulasi yang ada mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna IKD, mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dalam program digital pemerintah dan juga meneliti tingkat literasi digital dan kesiapan masyarakat menggunakan layanan berbasis teknologi seperti IKD, terutama di kalangan lansia atau warga dengan akses terbatas ke perangkat digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. G Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

AG. Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agindawati, I. N. (2019). Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan *Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective*. Jurnal Inspirasi, 10 (1), 98-105.

Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta Bandung.

Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.

Alttya Kawengian, A. P. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 1 No.1*, 1-10.

Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No. 1*, 1-12.

Anryana, A., Yamin, N., & Fietroh. (2024). Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Volume 7, Nomor 1*, 188-193.

Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Ariska Tri Viky Andani, E. S. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik JIAP Vol 5, No 3*, 1-9.

Carl Van Horn, D. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

Cook Curtins W & Philip H. (2007). *Management and Organizational Behaviour. New York: McGraw-Hill Education.*

Creswell, John W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.

Djuyandi, Y. (2013). Implementasi Kebijakan Layanan Secara Elektronik Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Jawa Barat . *Faculty of Economic and Communication HUMANIORA Vol.4 No.2* , 1-13.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gajah Mada University.

Farida Yusuf Tayibnapis. 2000. "Evaluasi Program". Jakarta: Rineka Cipta.

Habermas, J. (1989). *Ruang Publik : Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis.* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Meutia, I. F. (2017). *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.* Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.

Ita Oktaviana, R. S. (2022). Advokasi kebijakan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana di kecamatan.

Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Jones, C. O. (1991). *An Introduction To The Study Of Public Policy.* Jakarta: Cv Rajawali.

Lincoln and Guba. (1985). *Qualitative Research*. Singapore. Singapore: M c

Lintang, D., & Suherman, A. (2023). Standar Pelayanan Publik (Studi pada Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, *13*(1), 64-73.

Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services.* New York: Russell Sage Foundation.

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022

Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Volume 4, Nomor 2*, 80-88.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.* Surakarta:Unisri Press.

Rahmawati, L., Arlan, A. S., & Urahmah, N. (2024). Implementasi Identitas Kependudukan Digital (ikd) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik Vol. 1, No. 1*, 1-6.

Ramadhan, A., Heryani, A., & Ramdani, A. (2022). Adaptive Governance dalam Pelayanan Disabilitas di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 9 Nomor 2*, 1-13.

S.P. Siagian. (1990). Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta.

Safitri, D. V., & Prathama, A. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. *JPA The Indonesian Journal of Public Volume 09 Nomor 02*, 1-7.

Satria, B. A. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi di Institut Pahlawan 12. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 11 Nomor 1*, 1-15.

Siagian, Sondang P. (1990). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alphabet Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta,Bandung

Sutojo, A. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Atau Aturan Terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Volume 4 No. 2*, 1-11.

Tayibnapis, F. Y. (2000). *Evaluasi program.* Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Wahab. S,Solichin. (2005). Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, hal. 14 - 15.

Zuldafrial. (2012). Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Media Perkasa Yogyakarta: lesfi. Batuwarno kabupaten wonogiri. 1-9.